

KOMITE SEKOLAH SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Oleh:
Tri Qurnati

ABSTRAK

Pelaksanaan pembelajaran tentu berkeinginan untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif, psikomotor, dan afektif. Kurikulum 13 yang diberlakukan sekarang mengedepankan pembentukan sikap. Ini terlihat pada keharusan mencapai kompetensi inti satu dan dua, tiga dan empat (KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4). KI 1 merupakan tujuan yang terkait dengan pembentukan sikap religius dan KI 2 pembentukan sikap sosial pada peserta didik. Sedangkan KI 3 terkait dengan penguasaan pengetahuan, dan KI 4 berbentuk penguasaan keterampilan. Tercapainya KI dan KI 2 sangat membutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Tulisan ini ingin mengungkap bagaimana memberdayakan Komite sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disebut KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Komite sekolah bisa berhasil bila fungsi perencanaannya, pengorganisasiannya, kepemimpinannya, pengendaliannya, dan pengawasannya berjalan dengan baik. Alternatif kerjasama komite sekolah dengan sekolah antara lain dapat berbentuk: mengadakan rapat untuk pemecahan masalah, mengadakan kunjungan ke rumah peserta didik, melibatkan orang tua peserta didik dalam proses pendidikan, pemberian bantuan-bantuan orang tua kepada sekolah, ikut serta dalam penentuan kebijakan, berkirim surat, bertelepon, mengadakan pameran. Hubungan kerjasama orang tua, sekolah dan masyarakat dapat membuahkan hasil dan efektif bila tertanam rasa saling percaya dan saling jujur dalam bertindak.

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan telah dikenal istilah Tri Pusat Pendidikan. Tiga pusat pendidikan tersebut adalah pendidikan yang berlangsung dirumah tangga, di sekolah dan di masyarakat luas. Kerja sama dari ketiga unsur Tri Pusat pendidikan tersebut dapat membawa keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Diantara bentuk kerja sama antara lembaga pendidikan khususnya sekolah dan masyarakat sebagai *stake holder* dapat terlihat dengan terbentuknya organisasi yang disebut Komite Sekolah yang sebelumnya bernama BP3 atau Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. Tugas Komite Sekolah adalah membantu sekolah agar proses belajar para siswa menjadi lebih lancar, terutama yang berkaitan dan yang dapat dikaitkan dengan masyarakat. Anggota-anggota Komite Sekolah berasal dari para orang tua siswa yang aktif/bersedia duduk dalam badan tersebut.¹

Organisasi Komite sekolah dibentuk sebagai realisasi SK Menteri no. 202 untuk desentralisasi. Undang-undang pendidikan bulan Juni 2003, pasal 56 memberikan kepada komite sekolah dan madrasah peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: nasihat, pengarahan, bantuan personalia, material dan fasilitas, maupun pengawasan pendidikan.

Undang-undang ini memberi peran kepada komite sekolah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah. Bila saja ini dapat dijalankan semuanya tentu tujuan yang diharapkan dapat tercapai, karena peran tersebut dapat mendorong tumbuh perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mendorong orang

¹ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 200-201.

tua dan masyarakat, berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.²

Proses pendidikan akan memberikan hasil yang memuaskan, bila semua sumber dayanya dapat diberdayakan semaksimal mungkin. Agar hal ini dapat tercapai, maka semua sumber daya pendidikan tersebut harus dikelola sedemikian rupa.

Salah satu sumber daya pendidikan adalah Komite Sekolah / Majelis sekolah. Bila manajemen Komite Sekolah berjalan dengan baik, maka ia akan ikut adil dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas tentang bagaimana memberdayakan Komite Sekolah/majelis sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka akan dirujuk beberapa literatur terkait. Selanjutnya pembahasan makalah ini akan diisi pertama dengan pendahuluan, kedua isi yang memuat judul Komite Sekolah dan pemberdayaannya dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga berupa kesimpulan.

II. KOMITE SEKOLAH DAN PEMBERDAYAANNYA DALAM BUNIA PENDIDIKAN

Sebagai mana telah disebutkan diatas bahwa untuk mencapai keberhasilan pendidikan, diperlukan kerja sama yang erat antara elemen dari ketiga pusat pendidikan yang dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan, terutama antara pendidikan di sekolah dan rumah tangga, antara guru dan orang tua. Kedua belah pihak tersebut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan peserta didik.

Orang tua bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didik karena ia adalah pendidik alamiah, atau karena ia memikul tanggung jawab sebagai pendidik karena kodrat. Sedangkan guru bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan karena jabatannya.

Kerja sama orang tua dan guru memerlukan pembenahan – pembenahan dan pengaturan - pengaturan agar dapat berfungsi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama orang tua dengan sekolah untuk keberhasilan pendidikan di sekolah dapat berbentuk antara lain: menanyakan kegiatan belajarnya di sekolah, mengontrol/memantau tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan, memberikan motivasi kepada anak untuk rajin belajar, seperti menyediakan makanan kecil yang dapat disantap anak selesai belajar, menyediakan keperluan belajar anak, bahkan untuk tingkat sekolah dasar, anak didampingi saat belajar, untuk dapat membantunya bila mereka menemukan kesulitan.

Di dalam buku *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan* dijelaskan bahwa sebenarnya, menurut pandangan paedagogik teoritis, hak dan kewajiban mendidik anak sepenuhnya berada di tangan orang tua . Tetapi, karena ketidak mampuan mereka melaksanakan kewajiban/hak tersebut, maka sebagian diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan.

Bagian yang diserahkan kepada lembaga pendidikan sekolah adalah masalah pembentukan intelektual. Karena sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah rumah tangga, maka ia juga berkewajiban mendidik peserta didik.³ Dengan demikian, sekolah juga berfungsi sebagai pelaku sebagai pelaku transfer of knowledge, transfer of value dan transfer of skill. Dengan berlakunya kurikulum 13, proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai empat Kompetensi Inti (KI), yaitu terbentuknya sikap religius (KI 1), sikap sosial (KI 2), penguasaan pengetahuan (KI 3), dan keterampilan (KI 4) pada peserta didik. Tuntutan

²² Serambi Indonesia, 26-10-2002, hal. 1 dan 11.

³ Hendiyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 151-152.

kurikulum ini membuat peran komite sekolah perlu lebih diberdayakan lagi, terutama dalam hal pencapaian KI 1 dan KI 2.

Untuk merealisasikan kerjasama antara orang tua dan guru, sejak tahun 60-an telah didirikan suatu organisasi dengan nama *POM* (Persatuan Orang Tua Murid). Tujuan pendiriannya adalah untuk memudahkan usaha-usaha kerja sama antara sekolah dengan orang tua.⁴ Organisasi yang bernama *POM* tersebut kemudian berganti nama menjadi *POMG* (Persatuan Orang tua Murid dengan Guru). Kemudian, berubah lagi menjadi Komite Sekolah. Sejak tahun 2002, Komite Sekolah berubah menjadi *Majelis Sekolah* (MS).

Pada dasarnya *Majelis Sekolah* juga berperan untuk mewujudkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dengan sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dipahami dari tugas-tugas yang telah digariskan untuk dilaksanakan oleh majelis ini Tugas MS sebagai mitra sekolah a.l. adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi kegiatan penyesuaian materi pendidikan di sekolah dan pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (*stake holder*).
- b. Menjadi mitra dalam mendekati *stake holder* agar menjadi pasangan dalam melaksanakan *Pendidikan Sistem Ganda* (PSG).
- c. Menjadi mitra dalam merumuskan dan penanda tanganan naskah kerjasama antara sekolah dan institusi pasangannya.
- d. Memotivasi sekolah dan *stake holder* dalam pelaksanaan *holder*
- e. Membentuk team sistem pengujian dan sertifikat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelaksanaan sistem pengujian dan sertifikasi yang mengacu kepada kebutuhan lapangan kerja.
- f. Memasarkan tamatan sekolah menengah.⁵

Bila dibandingkan antara tugas *Komite Sekolah* dan *MS*, maka akan terlihat beberapa perbedaan diantara keduanya.

Tujuan didirikan *Komite Sekolah* yaitu: membantu sekolah untuk memperlancar proses belajar siswa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tugas *Komite Sekolah* hanya berkisar tentang usaha memperlancar proses belajar siswa tanpa ikut serta dalam perencanaan program-program untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dan tujuan ini dimaknai dan direalisasikan dengan pemberian bantuan *Komite Sekolah* berbentuk material, baik berupa bangunan gedung, peralatan sekolah, honor tambahan untuk guru pada setiap sekolah. Dan dana tersebut dikutip dari seluruh orang tua peserta didik berdasarkan keputusan rapat Komite Sekolah yang biasanya hanya merupakan keputusan beberapa gelintir orang tua yang punya keterampilan berbicara dan dari kalangan orang tua berduit. Sehingga kadangkala keputusan ini memberatkan kalangan menengah kebawah.

Keberatan ini berdampak kurang harmonisnya hubungan orang tua yang merasa terbebani akibat keputusan tersebut dengan sekolah. Mereka kadangkala merasa tidak berdaya menghadapi/menolak keputusan tersebut karena berbagai alasan, antara lain: tidak pandai bersilat lidah, malu diketahui ketidak mampuan mereka, khawatir reaksi negative dari pihak sekolah yang berdampak terhadap putra/I mereka yang sedang bersekolah di sekolah tersebut. Fenomena ini terlihat di dalam keseharian, malah ada yang sampai dicover di dalam media masa, seperti kasus pengutipan dana sumbangan *Komite Sekolah* yang meresahkan orang tua

⁴ Dewi Nugroho Hidayanto, *Pengantar Komunikasi Interpersonal Suatu Keterampilan Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal.19.

⁵ Wardiman Djoyonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1998), hal.87-88.

murid akibat tidak mampu menyumbang dana yang mencapai ratusan ribu rupiah per calon siswa. Peristiwa ini berbuntut dipanggilnya kepala sekolah tersebut oleh DPRD.⁶

Sebenarnya masih banyak kasus seperti itu terjadi di masyarakat, tetapi rasa keberatan tidak berani diungkapkan baik kepada yang berwenang apalagi kepada pers. Akibatnya, keharmonisan hubungan antara guru dan orang tua peserta didik terganjal. Dan kerjasama yang diinginkan menghasilkan hal-hal positif demi meningkatkan keberhasilan pendidikan menjadi terkendala. Malah citra sekolah/guru menjadi bertambah turun dimata masyarakat, karena sering “meminta-minta” kepada orang tua peserta didik.

Sebenarnya, bila saja organisasi Komite Sekolah/Majelis Sekolah ini dapat berbenah diri, maka keberadaannya dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah-sekolah. Bantuan yang diberikan tidak saja dalam bentuk material, tetapi dapat lebih dari itu, yaitu bantuan moral dan material.

Bantuan moral umpamanya mengajarkan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki orang-orang tua serta berguna dan dibutuhkan para peserta didik dengan cuma-cuma. Atau dengan kata lain, orang tua peserta didik yang mempunyai keahlian khusus yang berguna dan cocok untuk diberikan kepada peserta didik, dijadikan tutor di sekolah tersebut. Kemudian dengan menampung ide-ide brilyant yang mungkin timbul dari pihak mereka dan kemudian ide tersebut dicoba terapkan dengan kerjasama semua pihak.

Bila dibandingkan dengan tugas Komite Sekolah, maka tugas Majelis Sekolah lebih luas. Majelis Sekolah bekerja sama dengan sekolah mulai dari perencanaan materi ajar, proses pembelajaran, sehingga pencarian lapangan kerja untuk tamatan yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya.

Majelis Sekolah terlibat dalam penyusunan kurikulum, memberi bantuan belajar secara moral dan material kepada peserta didik dan bahkan menyiapkan kemungkinan pemasaran alumni ke pasaran kerja. Selanjutnya, anggota Majelis Sekolah bukan saja dari kalangan orang tua peserta didik, pihak guru, tetapi juga *stake holders* sekolah.

Meskipun demikian, semua ide baik yang dicanangkan oleh Komite Sekolah/Majelis Sekolah tetap saja kurang bermanfaat bila sekolah tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukan usaha untuk memberdayakan organisai Komite Sekolah/ Majelis Sekolah ini. Usaha tersebut antara lain dengan menerapkan manajemen yang tepat pada organisasi tersebut. Untuk ini perlu dilihat kembali pengertian dari kata manajemen itu sendiri.

Manajemen dapat diartikan sebagai “ proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.”⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi terbentuk termasuk Komite Sekolah/Majelis Sekolah baru dapat berhasil bila fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian dan pengawasannya berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut perlu diketahui dan dijalankan. Untuk lebih jelas tentang fungsi tersebut, disini akan digunakan penjelasan Nanang Fattah di dalam bukunya *Landasan Manajemen Pendidikan*.⁸ Berikut ini merupakan penjelasan tersebut.

Di dalam manajemen disebutkan bahwa fungsi perencanaan antara lain untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu ini

⁶ Serambi Indonesia, Jumat, 19-7-2000, hal.3.

⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal.1

⁸ *Ibid*, hal. 2.

dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan peluang dan kemungkinan hambatan, merencanakan strategi, kebijakan, taktik dan program.

Sedangkan fungsi pengorganisasian mencakup penentuan fungsi, hubungan dan struktur. Dalam penentuan fungsi digariskan tugas-tugas yang dibagikan ke dalam fungsi, garis, staf, dan fungsional. Di dalam hubungan, ditentukan tentang tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan di dalam struktur, akan terlihat ada yang berbentuk horizontal dan vertikal. Di dalam pengorganisasian inilah dijelaskan tentang pembagian tugas berikut penanggung jawabnya. Semua ini untuk memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana.

Adapun fungsi pemimpin adalah mengarahkan dan mempengaruhi bawahan, agar dapat melaksanakan tugas esensial dengan menciptakan suasana menyenangkan untuk bekerja sama.

Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standard dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan ini sangat erat hubungan dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektifitas manajemen dapat diukur.

Dengan berjalannya manajemen Komite Sekolah/Majelis Sekolah secara baik, maka akan dapat dilihat tujuan dan kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini merupakan hasil dari langkah perencanaan. Di dalam perencanaan, organisasi dituntut untuk mempunyai daya prediksi yang baik sehingga perhitungan benar-benar mantap sehingga rencana-rencana yang dibuat benar-benar membumi dan tepat.

Selanjutnya, Komite Sekolah juga perlu menyusun pembagian tugas yang sejalan dengan perencanaan, dan tugas-tugas yang telah dibagikan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian, pimpinan organisasi ini dituntut untuk mampu mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya agar melaksanakan tugas mereka, di samping itu ia juga dituntut untuk mampu menciptakan suasana menyenangkan untuk bekerja sama.

Setelah itu, organisasi ini juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya agar dapat mengetahui apakah perencanaan yang ada telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan berjalannya fungsi ini maka organisasi bisa memperoleh masukan-masukan tentang keberhasilan yang dicapai, kendala-kendala yang menghalang, serta dapat memperbaiki kinerja untuk masa berikutnya.

Memang untuk melaksanakan tugas manajemen bukanlah hal yang mudah, karena ia merupakan seni untuk mengatur orang lain. Hal ini diutarakan oleh Mary Parker Follet. Hal senada juga diungkapkan oleh Henry M. Botinger. Malah ia mengatakan bahwa manajemen memerlukan tiga unsur, yaitu : pandangan, pengetahuan teknis, dan komunikasi. Dengan demikian, di dalam memanej suatu organisasi perlu dipahami hubungan antar manusia, struktur sosial. Ini memerlukan pengetahuan, dan intuisi yang tajam dari manajer organisasi.

Di samping adanya Komite Sekolah, hubungan orang tua peserta didik dengan guru dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- a. Rapat pemecahan masalah
- b. Kunjungan ke rumah peserta didik
- c. Keterlibatan orang tua peserta didik dalam proses pendidikan di kelas
- d. Pemberian-pemberian bantuan orang tua kepada sekolah
- e. Penentuan kebijakan⁹

Sebagaimana dijelaskan di dalam buku *Manajemen Berbasis Sekolah/MBS*, Faesal Muslim dkk. Menambahkan usaha tersebut dengan menambahkan point berikut, yaitu:

- 1) Berkirim surat

⁹ Hidayanto, *opcit*, hal.14.

- 2) Bertelepon
- 3) Mengadakan pameran.¹⁰

Kesemua kegiatan ini sebenarnya dapat menjadi agenda dari organisasi Komite Sekolah/MS karena kegiatan-kegiatan tersebut bila direncanakan dengan baik akan sangat berguna untuk mempererat hubungan orang tua murid dengan sekolah. Dengan demikian, orang tua peserta didik akan bekerja sama dengan guru dalam memacu pendidikan anak-anak mereka untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tetapi sebelumnya, agar hubungan kerja sama dapat membuahkan hasil, pihak sekolah dan orang tua harus terlebih dahulu menanamkan rasa saling percaya dan saling jujur dalam bertindak. Bila hal ini tidak tertanamkan pada kedua belah pihak, maka kerja sama tersebut tidak akan membuahkan hasil yang efektif.

Komite Sekolah/MS sebagai suatu organisasi bekerja dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam teori modern, suatu organisasi dapat menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang menyatu dengan maksud tertentu yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan. Pendekatan ini memberikan kepada manajer suatu cara untuk memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan.

Dalam mencapai tujuan, menurut teori sistem harus didasarkan pada lima asumsi dan lima prinsip bekerja. Kelima asumsi dan prinsip bekerja itu adalah sebagai berikut:

| <u>Asumsi</u> | <u>Prinsip</u> |
|--|---|
| 1. Organisasi merupakan sistem terbuka | 1. Servis untuk lingkungan |
| 2. Organisasi mencari prestasi maksimum | 2. Prinsip optimasi |
| 3. Tujuan organisasi sangat bervariasi | 3. Multidimensional |
| 4. Tujuan organisasi saling kebergantungan | 4. Prinsip keharmonisan |
| 5. Tujuan organisasi berubah-ubah | 5. Prinsip pengurangan resiko ¹¹ |

Berpijak kepada pendapat di atas, maka Komite Sekolah/MS sebagai suatu organisasi dapat mengikut dan menerapkan prinsip tersebut bila ingin mencapai tujuannya. Penerapan prinsip tersebut harus dijalankan semua bagian dari organisasi tersebut, baik individunya, organisasi secara keseluruhan, gaya kepemimpinannya, perangkat fisiknya.

Dalam rangka mengatasi rendahnya mutu pendidikan nasional dan dalam rangka menyahuti otonomi daerah, termasuk otonomi bidang pendidikan, kini telah diuji cobakan *Manajemen Berbasis Sekolah* (MBS). Melalui MBS ini sekolah dituntut bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena ia ingin membentuk masyarakat peduli pendidikan.

Pengolahan sekolah model MBS ini sangat mementingkan peran masyarakat. Untuk itu perlu upaya menggalang peran serta masyarakat guna terlaksananya pendidikan dengan baik. Dalam hal ini, Supriono S. dan Achmad Sapari dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah* menawarkan langkah berikut:

- 1) Sekolah mengundang orang tua peserta didik, Komite Sekolah dan tokoh masyarakat ke dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah memaparkan keadaan dan capaian sekolah selama ini, begitu juga visi, misi sekolah, serta memberikan prediksi keadaan anak ke depan. Dalam diskusi ini moderator harus dapat merangsang peserta diskusi untuk mengungkapkan pendapat dan unek-uneknya.
- 2) Sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga pada masyarakat.

¹⁰ Supriono S, Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: SIC, 2001), hal.19.

¹¹ Fattah, *opcit*, hal.30.

- 3) Kepala sekolah dan guru memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk turut mengelola keuangan sekolah, terutama yang bersumber dari masyarakat. Kepercayaan ini akan mendorong masyarakat semakin bergairah untuk memikirkan sekolah, serta timbul perasaan untuk tidak menyalahgunakan amanah tersebut.
- 4) Sekolah menerapkan manajemen terbuka. Dengan demikian masyarakat akan semakin mempercayai apa yang dilakukan sekolah, sehingga mereka juga akan berpartisipasi aktif untuk membantu mensukseskan program pendidikan.¹²

Dalam pelaksanaan MBS, maka Komite Sekolah/MS harus menjalankan peran antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai mitra seajar kepala sekolah yang ikut merencanakan kegiatan sekolah.
2. Menyusun dan mengusulkan agenda pembicaraan pada setiap pertemuan sekolah. Karena Komite Sekolah/MS adalah institusi yang mewakili masyarakat, mempunyai hak untuk menyampaikan keinginannya, bentuk dan jenis pendidikan anaknya, serta tujuan akhir dari sekolah anaknya.¹³

Selanjutnya, Komite Sekolah/MS dapat memberi bantuan kepada sekolah dalam beberapa bentuk. Sebelum bantuan itu diberikan ia harus membicarakannya dengan orang tua peserta didik, kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Bentuk bantuan tersebut antara lain:

- a. Bantuan fisik.
- b. Bantuan teknis edukatif. Bantuan bentuk ini yang diharapkan dari Komite Sekolah:
 - 1) Membantu menyiapkan tenaga guru bila sekolah kekurangan tenaga guru.
 - 2) Membicarakan kinerja guru, prestasi siswa, membahas sebab kelemahan sisi murid dan guru, serta mencari solusinya.
- c. Bantuan bidang manajemen. Bantuan dalam bidang ini dapat berbentuk menangani masalah keuangan sekolah, membuat rencana sekolah (RAPBS), menyampaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat bersama kepala sekolah dan dapat juga meneliti dan memilih buku yang digunakan untuk belajar peserta didik di sekolah.¹⁴

Bila MBS ini berjalan dengan baik, maka sekolah akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan Komite Sekolah atau masyarakat. Di sana akan dibicarakan secara terbuka semua persoalan sekolah. Hal-hal yang perlu dipertanggung jawabkan sekolah kepada masyarakat adalah:

- 1). Kinerja guru; 2). Perilaku guru; 3). Kesejahteraan guru; 4). Pelaksanaan pembelajaran; 5). Pelaksanaan rencana sekolah; 6). Kekurangan tenaga pengajar; 7). Keadaan fisik gedung; 8). Keuangan sekolah; 9). Keuangan Komite Sekolah.¹⁵

Pertanggung jawaban yang seperti ditawarkan MBS sulit untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Aceh sekarang ini. Ini antara lain disebabkan berbedanya budaya yang dianut antara masyarakat yang menginspirasi ide tersebut, yaitu masyarakat yang telah maju di bidang pendidikan seperti: Jepang dan Amerika Serikat dengan negara penerima ide tersebut yaitu Indonesia, yang tertinggal jauh dalam bidang pendidikan. Bahkan di kawasan Asia Tenggara pun ia menempati posisi level “bawah”.

Oleh karena itu mereka belum terbiasa dengan pola tersebut dan belum tentu cocok dengan budaya mereka. Oleh karena itu, beban yang berat ini kelihatannya belum sanggup dipikul oleh masyarakat. Terlebih lagi sumberdaya manusianya yang professional, mengerti tentang dunia pendidikan dan menyadari pentingnya peranan masyarakat dalam memajukan

¹² Supriono, *opcit*, hal.16.

¹³ *Ibid*, hal. 18.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 20.

pendidikan belum memadai. Di samping itu, idealisme politik dan masyarakat umum untuk memajukan dunia pendidikan masih memerlukan pembinaan dan peningkatan.

Meskipun demikian, masyarakat Indonesia harus mengejar ketinggalannya dengan berbagai cara yang sesuai dan mampu dilakukannya. Bila hal yang ditawarkan oleh program MBS itu baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh agama dan negara, boleh saja diterima. Soal kemampuan masyarakat, dapat dibina. Karena bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya bertugas mempertahankan nilai-nilai budaya. Tetapi ia juga berfungsi untuk menyeleksi budaya-budaya yang tidak baik dan memperbaikinya. Kemudian, bila dikembalikan kepada teori belajar, dikatakan belajar itu adalah usaha untuk memperbaiki/merubah tingkahlaku.¹⁶ Dengan demikian, ketidak mampuan / ketidak sediaan masyarakat untuk menanggung tanggung jawab pendidikan perlu dibenah dan diperbaiki.

Penjelasan-penjelasan yang lalu merupakan kumpulan beberapa alternatif untuk memberdayakan Komite Sekolah. Terpulang kepada masyarakat untuk memilih mana yang dirasa sesuai untuk diterapkan. Yang terpenting, paling kurang Komite Sekolah ini dapat dijadikan mediator antara masyarakat dengan sekolah dalam menjalin kerjasama untuk memajukan dunia pendidikan.

Penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang pemberdayaan Komite Sekolah memperlihatkan pentingnya peran kepala sekolah dalam memberdayakan hubungan sekolah dengan Komite Sekolah/MS atau masyarakat lainnya dalam rangka memajukan pendidikan. Dalam hal ini Made Pidarta mengemukakan pandangan Jones tentang tanggung jawab kepala sekolah dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Tanggung jawab tersebut menurutnya berbentuk:

- 1) Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi di atasnya.
- 2) Mengorganisasi program hubungan dengan masyarakat.
- 3) Melakukan kontak-kontak individual.
- 4) Mengembangkan kualitas program hubungan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kepemimpinan.¹⁷

Pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah juga dikontrol oleh pengawas. Dalam melaksanakan tugasnya pengawas juga ikut mengawasi tentang Komite Sekolah/MS. Hal yang menjadi focus pengawasan terhadap Komite Sekolah/MS antara lain:

- 1) Pembentukan pengurusan Komite Sekolah/MS sesuai dengan ketentuan.
- 2) Uraian tentang tugas pengurus Komite Sekolah/MS.
- 3) Program kerja Komite Sekolah/MS dalam menunjang program sekolah.
- 4) Laporan pertanggung jawaban keuangan Komite Sekolah/MS setiap tahun.¹⁸

Dengan memperhatikan tugas pengawas terhadap Komite Sekolah/MS, maka terlihat bahwa sebenarnya hubungan sekolah dengan masyarakat telah menjadi perhatian kalangan aparat pendidikan. Hanya saja tingkat intensitas dan pemberdayaannya untuk memajukan dunia pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius. Dengan model MBS yang sedang dicanangkan dan digulirkan sekarang ini, barulah Komite Sekolah/MS diberdayakan semaksimal mungkin.

¹⁶ Prasetya Irawan dkk., *Teori Belajar, Motivasi, dan Keterampilan Mengajar*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hal.23.

¹⁷ Made Pidarta, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksari,1992), hal. 338.

III.KESIMPULAN

Untuk mengakhiri pembahasan makalah ini, maka akan disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

Kebutuhan adanya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, adanya kerja sama orang tua peserta didik dengan sekolah telah disadari sejak bertahun-tahun yang lalu. Kesadaran ini kemudian mengkristal di dada orang tua peserta didik dan mencuat sehingga pada tahun 60-an didirikanlah suatu organisasi yang bernama POM. Seiring dengan perkembangan masa, nama organisasi tersebut berubah menjadi POMG, Komite Sekolah, dan kini disebut dengan MS.

Sebelum dicanangkan MBS, keberadaan Komite Sekolah/MS belum diberdayakan semaksimal mungkin untuk kemajuan dunia pendidikan. Kini dengan digulirkan MBS, maka keberadaan Komite Sekolah/MS ini lebih diberdayakan dengan menggunakan kiat-kiat tertentu.

Cara memberdayakan Komite Sekolah/MS menurut versi MBS adalah dengan menjadikannya mitra sejajar kepala sekolah, memberikan kesempatan kepadanya untuk menyusun dan mengusulkan agenda pembicaraan pada setiap pertemuan sekolah, dan memberi bantuan kepada sekolah yang bersifat fisik, teknis edukatif, dan managerial. Tentu saja mengelola Komite Sekolah/MS sehingga menjadi sumberdaya yang handal, tidak terbatas kepada kiat-kiat tersebut diatas. Banyak lagi yang dapat dilakukan, karena pekerjaan mengelola, memanaj adalah suatu seni. Dengan demikian, terpulang kepada manajer bagaimana ia mengembangkan seninya guna memberdayakan Komite Sekolah/MS demi memajukan pendidikan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa Komite Sekolah/MS sebagai suatu organisasi, maka ia akan berhasil bila fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dan pengawasan berjalan dengan baik.

DAFTAR BACAAN

- Atmodiwiryo, Subagio, 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Ardadizya.
- “Dinas Pendidikan Belum Salurkan Dana BP 3”, *Serambi Indonesia*, 26-10-2002.
- Djoyonegoro, Wardiman, 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta, Jayakarta Agung Ofset.
- Fattah, Nanang, 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hidayanto, Dwi Nugroho, 1992. *Pengantar Komunikasi Interpersonal Suatu Keterampilan dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Liberty.
- Irawan, Prasetyo dkk., *Teori Belajar, Motivasi, dan Keterampilan Mengajar*, Jakarta, Depdikbud.
- Pidarta, Made, 1988 a, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Pidarta, Made, 1991 b. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- S. Supriono, Achmad Sapari, 2001, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta, SIC.
- Soetopo, Hendiyat, Wasty Soemanto, 1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara.